



Penyebab Jepang Melakukan Penangkapan Paus di Antartika

I Gusti Krishna Aditama

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The aim of this research is to find out why Japan still continue their whaling program, even though the previous program was banned. Moratorium of whaling for commercial purpose was signed in 1986 by member states of International Whaling Commission. The next year after the moratorium, Japan launched scientific research program named *Japanese Whale Research Program under Special Permit in the Antarctic* (JARPA). The second research program which is named JARPA II was banned by International Court of Justice due to violations of some articles on *International Convention for Regulation of Whaling*. After the banned, Japan is back on doing scientific whaling program. This research is done by using explanatory method, using qualitative analysis technique through accumulating primary and secondary data. Based on green political theory, environmental security, and ecological crime, the main reason why Japan still continue their whale research program is culture. This culture starts to disappear when whaling moratorium was signed. Government of Japan created several policies to address this issue. Supports Institute of Cetacean research for whale research and launched campaign activities to reintroduce whale culture for the people. These evidence proof that culture is the main motive on why Japan still continue their whale research program.

Keywords: *whaling, Japan, government, culture*

Pendahuluan

Jepang adalah salah satu negara yang masih menangkap paus. Antara negara-negara yang tergabung dalam IWC, Jepang melakukan penangkapan dengan jumlah yang paling banyak. Moratorium penangkapan paus dibuat untuk mencegah spesies paus dari kepunahan, namun dilihat dari jumlah yang ditangkap oleh Jepang, hal ini tentu tidak baik bagi keberlangsungan spesies paus. Dalam melakukan penelitiannya, Jepang menggunakan haknya untuk mengatur dan meregulasi penangkapan paus seperti menentukan kuota ikan yang akan ditangkap.

Program JARPA adalah program pertama yang dilakukan Jepang dalam melakukan penelitian tentang paus. Program ini dirancang untuk berjalan selama 16 tahun (ICRWHALE, 2011). Pada tahun 1987, saat dilaksanakannya pertemuan tahunan IWC, yaitu satu tahun setelah moratorium terhadap paus ditandatangani, Jepang mengajukan proposal penelitian yang isinya menyatakan Jepang akan menangkap paus berjenis Minke sejumlah 825 ekor, 50 paus bejenis Sperma (Hirata, 2005). Pada tahun 1989-1994, jumlah paus yang ditangkap oleh Jepang mencapai 330 ekor per tahun (Hirata, 2005). Pada tahun 1995-1996, pada saat program JARPA dilaksanakan, Jepang memperluas area penangkapan yang membuat jumlah paus yang ditangkap oleh Jepang mencapai 440 per tahunnya (Hirata, 2005). Pada musim perburuan tahun 2004-2005, yaitu dimana akhir dari periode program, nelayan Jepang telah menangkap paus lebih dari 6800 ekor (Anton,

2009). Pengajuan ini membuat para negara anggota marah, sehingga IWC memberikan rekomendasi kepada Jepang untuk menarik kembali proposal yang telah diajukan.

Australia juga melakukan beberapa upaya untuk menghentikan kegiatan penangkapan paus oleh Jepang. Upaya yang dilakukan oleh Australia adalah dengan membawa kasus ini ke International Court of Justice (ICJ), dan pada 31 Maret tahun 2014 program JARPA II dihentikan karena dianggap melanggar moratorium global tentang penangkapan paus (Rajca, 2015). Faktor lain yang membuat ICJ menghentikan program ini adalah jumlah paus yang ditangkap Jepang tidak masuk akal untuk ukuran penelitian. Selain itu, ICJ memutuskan bahwa program JARPA II tidak sesuai dengan ketentuan yang tertera pada paragraf 7(b) tentang larangan menangkap paus karena telah menangkap paus di wilayah “*Southern Ocean Sanctuary*”. Program JARPA II juga dianggap telah melanggar artikel 7 dari International Convention for The Regulation of Whaling (ICRW).

Penelitian yang mengangkat kasus penangkapan paus dalam jumlah besar oleh Jepang dengan demikian penting dilakukan karena berkaitan dengan salah satu permasalahan yang masih berlangsung. Jumlah paus yang ditangkap oleh Jepang tidak masuk akal untuk ukuran penelitian, sehingga perlu ditemukan jawaban apakah program ini murni penelitian atau tidak. Kuota penangkapan besar menimbulkan asumsi bahwa ada tujuan lain di balik kegiatan penelitian ilmiah. Selain itu, metode yang tidak sesuai dan menyalahi prosedur yang ada menyebabkan munculnya pihak yang meragukan apakah kegiatan penelitian yang dilakukan oleh Jepang adalah penelitian ilmiah. Melalui tulisan ini, akan diuraikan secara rinci permasalahan yang ada, sehingga dapat diketahui apa yang menjadi inti permasalahannya, untuk kemudian ditemukan solusinya. Karena pada tahun 2015, Jepang kembali mengajukan program penelitian dengan menangkap paus.

Pembahasan

Perkembangan Industri Penangkapan Paus

Penangkapan paus pada awalnya dimulai pada era *Coastal Whaling*. Kobayashi dalam tulisannya menyebutkan bahwa penangkapan paus pada era ini masih menggunakan cara yang sangat mendasar seperti menggunakan harpoon yang dilempar maupun menggunakan jaring (Kobayashi, 2006:181). Setelah ditangkap, paus pun dibawa menuju tempat pengolahan yang berada di bibir pantai untuk diolah menjadi berbagai produk. Kelemahan dari teknik pada era ini adalah jarak penangkapan tidak bisa jauh dari tempat pengolahan dikarenakan kapal pada saat itu tidak memiliki tempat pengolahan sehingga hasil tangkapan harus segera dibawa menuju tempat pengolahan. Teknik penangkapan paus mulai berkembang ketika kebutuhan akan paus meningkat. Teknik yang baru ini dibuat untuk supaya nelayan dapat memperluas jangkauan penangkapan paus dari teknik sebelumnya. Teknik *Pelagic Whaling* menyebar ke berbagai negara yang memiliki garis pantai (Kobayashi, 2006:181). Contohnya Rusia, yang memiliki pangkalan untuk mengelola hasil tangkapan di Australia, *New Zealand*, Kanada, dan Afrika Selatan. Sementara itu, Jepang memiliki tradisi menangkap ikan memiliki pangkalan hampir di setiap daerah.

Berbeda dengan negara-negara barat yang melakukan penangkapan paus secara komersial, di Jepang hal ini adalah budaya yang diwariskan secara turun-temurun (Takashi, 1989:106). Metodenya pun berawal dari yang paling sederhana, dari yang hanya menggunakan tombak dan kapak kecil yang menangkap paus berukuran kecil, sampai datangnya pengaruh barat yang membawa metode-metode penangkapan paus yang lebih efisien, yang dimana hal ini mengubah industri penangkapan paus di Jepang.

Selain konsumsi, Jepang juga memiliki kebudayaan yang membedakan tujuan penangkapan paus dibandingkan dengan negara-negara barat. Pertukaran hadiah yang dilakukan oleh organisasi penangkapan paus kepada penduduk lokal, serta penggunaan

bagian-bagian dari tubuh paus itu sendiri digunakan untuk ritual-ritual yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan paus (Takashi, 1989:106). Maka dari itu, beberapa bagian tubuh paus harganya lebih mahal dibandingkan dengan minyaknya.

Dewasa ini, konsumsi paus di kalangan masyarakat Jepang tidak se-populer zaman dahulu (theguardian.com, 2012). Penolakan untuk mengkonsumsi paus dari para pemerhati lingkungan, tekanan negara-negara lain sampai yang terakhir adalah keputusan dari International Court of Justice yang menyatakan kegiatan ilmiah penangkapan paus Jepang bukanlah kegiatan penelitian (theguardian.com, 2015). Jumlah distributor dan pengolah paus mengalami penurunan dari tahun dalam kurun waktu tahun 1999-2012. Distributor menyebutkan hal ini dikarenakan harga daging yang sangat mahal, kurangnya varian resep, dan citra buruk dari daging paus itu sendiri.

Regulasi Internasional dalam Upaya ntuk Menjaga Keberlangsungan Populasi Paus

Setelah IWC dibentuk, penangkapan paus mulai diregulasi berdasarkan aturan yang telah tertera pada *International Covention for the Regulation of Whaling*. Penangkapan paus secara komersial tetap diperbolehkan sampai pada tahun 1985/1986 ketika diberlakukannya moratorium penangkapan paus secara komersial. Moratorium penangkapan paus masih berlangsung sampai dengan hari ini, meskipun ada beberapa negara yang menyatakan keberatan dan masih menangkap paus untuk tujuan komersial seperti Norwegia, Islandia, dan Rusia (iwc.int, 2013).

Perkembangan Budaya Mengonsumsi Paus dalam Berbagai Era Kebudayaan Jepang

Salah satu hewan laut yang dikonsumsi oleh Jepang adalah paus. Sebelum ditetapkan menjadi salah satu spesies yang dilindungi, Jepang adalah salah satu negara yang menangkap paus dalam jumlah yang cukup banyak. Daging paus menjadi salah satu bahan makanan yang digemari oleh warga Jepang. Tingkat konsumsi paus mencapai angka tertinggi setelah era perang dunia ke 2 sebagai salah satu sumber protein yang dianggap penting (theguardian.com, 2012).

Diperkirakan Jepang telah melakukan penangkapan paus pada era Jomon atau 9.000 tahun sebelum masehi (Bowett, 2011:33). Paus dan lumba-lumba yang terjebak di area pinggir pantai ditangkap dengan menggunakan kapan berukuran kecil. Bukti dari penggunaan paus terdapat pada penemuan tulang-tulang yang berasal dari spesies berukuran besar digunakan sebagai alas untuk membuat barang pecah belah di daerah barat laut dan barat daya Kyushu pada pertengahan sampai akhir Jomon dan adegan perburuan paus ditemukan tergambar dalam sebuah tempat penyimpanan berupa toples yang digunakan untuk pemakaman di akhir era Yayoi (Bowett, 2011:34). Penggunaan tulang-tulang hewan untuk berburu dan menangkap ikan juga ditemukan dalam bentuk kail harpoon untuk membunuh spesies berukuran besar. Gambar di bawah ini merupakan contoh dari kepala anak panah, ujung tombak *harpoon*, kail ikan dan jarum yang digunakan oleh nelayan (metmuseum.org, 2010).

Pada abad ke-10, metode penangkapan paus menjadi lebih efektif dimana kapal-kapal nelayan berburu secara bersama-sama secara terorganisir, dan berbekal harpoon yang lebih modern sehingga lebih efektif (Bowett, 2011:34). Di awal era Edo, penangkapan paus telah berubah dari kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan populasi yang kecil menjadi sebuah kegiatan berskala industri di wilayah Taiji, Kishu. Jenis tangkapan di kota ini adalah spesies cetacean yang berukuran kecil dan sedang seperti lumba-lumba, dan paus berjenis pilot dan baird's beaked. Kegiatan penangkapan ini menjadi awal mulanya *Small Type Coast Whaling* (SCTW).

Pada tahun 1612, pemerintahan Tokugawa Shogun menerapkan kebijakan isolasionis yang salah satunya melarang orang asing untuk masuk ke Jepang, hal ini menyebabkan

para nelayan yang melakukan penangkapan paus tidak dapat berburu di laut lepas (Bowett, 2011:36). Namun, hal ini justru berdampak pada perubahan fokus area penangkapan yang pada awalnya berada di laut lepas, menjadi di area pantai atau *Coastal Whaling*. Metode yang digunakan para nelayan untuk melakukan penangkapan adalah dengan menggiring paus dengan menggunakan kanyan menuju jaring yang telah terpasang di area pantai. Setelah terjebak dalam jaring, para nelayan menusuk tubuh paus dengan menggunakan harpoon. Setelah itu paus dibawa ke tempat pengolahan di area pesisir untuk diolah menjadi bahan pangan, minyak dan lainnya. Pada era ini juga muncul kepercayaan bahwa daging sapi, lembu, dan kuda adalah daging yang kotor, maka dari itu ketika mengkonsumsinya tidak diperbolehkan untuk beribadah (shibusawa, 1969:65-68).

Setelah perang dunia ke-2 berakhir, Jepang memulai kembali kegiatan penangkapan paus di wilayah Antartika. Jepang menjadi salah satu signatories ICRW dan memulai penangkapan paus di bawah pengawasan dan manajemen IWC. Pada tahun 1960 an, IWC melihat bahwa ada beberapa jenis paus seperti paus bongkok dan paus biru mulai mengalami penerunan jumlahnya, penangkapan paus jenis ini pun mulai dilarang. Ketika beberapa negara mulai menghentikan operasi penangkapan paus yang pada saat itu dianggap terlalu mahal, Jepang masih melanjutkan penangkapan karena pada saat yang sama penjualan produk paus tidak menunjukkan penurunan. Jepang memperluas area penangkapan di wilayah Brazil, Peru, Chile, Filipina, dan Kanada untuk memastikan stok paus terpenuhi. Sebagai respon dari menurunnya populasi paus, pada tahun 1982, dibuat moratorium yang dimana dijelaskan bahwa penangkapan paus untuk tujuan komersial tidak diperbolehkan. Setelah mengajukan keberatan terhadap moratorium ini, Jepang mendapat tekanan dari berbagai pihak untuk turut serta dalam moratorium ini. Pada tahun 1987, seluruh kegiatan penangkapan paus di Jepang dihentikan secara paksa.

Fenomena Penangkapan Paus dalam Era Kontemporer

Setelah program JARPA II diputuskan ilegal oleh International Court of Justice (ICJ) pada tahun 2014, Jepang meluncurkan program penelitian baru yang diberi nama NEWREP-A. Menurut artikel yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Jepang, program yang diberi nama *New Scientific Whale Research Program in the Antarctic Ocean* (NEWREP-A) dibuat dari hasil evaluasi program sebelumnya. Program ini diajukan untuk diulas oleh IWC pada bulan November 2016.

Pada bulan Maret tahun 2016 mengutip artikel dari Vox.com Jepang menangkap 333 paus berjenis minke dari Antartika termasuk 157 diantaranya sedang hamil. Berita ini mengejutkan banyak pihak karena meskipun paus berjenis minke tidak termasuk dalam golongan kategori terancam punah, namun jumlahnya terus menurun (Vox.com, 2016). Selain itu, Jepang berpendapat bahwa penangkapan paus dengan jenis ini dan dalam keadaan sedang hamil maupun yang masih muda perlu dilakukan untuk mencari tahu usia kematangan seksual. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang dimana akan digunakan untuk membuktikan bahwa penangkapan paus berjenis minke dapat dilakukan karena populasinya dalam keadaan sehat (nationalgeographic.com, 2016).

Mengutip dari hasil sebuah survei oleh Nippon Research Center dan Greenpeace yang ditulis dalam sebuah artikel pada halaman website animalplanet.com menyatakan bahwa konsumsi daging paus di kalangan masyarakat yang berusia lanjut dalam kategori pria umur 50-60 dan 40-49 adalah grup yang paling tinggi tingkat konsumsi ikan daging paus, namun persentase kemungkinan mengkonsumsi hanya berkisar pada angka 11.6 persen pada kelompok 40-49 pada jawaban kadang-kadang, dan angka tersebut turun ke 7.4 pada kelompok umur 50-59. Pada grup wanita dengan umur 30-39, hasil yang diperoleh adalah mereka sangat jarang mengkonsumsi. Pada kelompok yang lebih muda, hasil yang diperoleh adalah mereka tidak pernah mengkonsumsi daging paus.

Terdapat kurang lebih 1.211,9 ton daging paus yang dilelang. Spesies paus yang dilelang seperti jenis sei, bryd, dan minke. Namun, diperkirakan hanya seperempat saja yang berhasil terjual. Berdasarkan diagram diatas, hal ini membuktikan bahwa kepopuleran daging paus di kalangan masyarakat Jepang mulai menurun. Maka dari itu, untuk tetap dapat menjual dan mendapatkan keuntungan dari daging paus serta melanjutkan program penelitian ilmiah, kegiatan lelang dilakukan. Menurut artikel yang di publikasikan pada website Iruka & Kujira Action Network (IKAN), sebanyak 3 ton daging paus jenis sperma tidak dijual, dan 235, 9 ton dijual dengan harga murah kepada masyarakat pedesaan dan sekolah. Proses lelang ini terbuka untuk umum dan juga penjual.

Meskipun banyak daging paus yang gagal terjual di pasar, pemerintah masih tetap melanjutkan program penangkapan paus. Rendahnya tingkat penjualan terhadap daging paus yang dijual oleh Institute of Cetacean Research melalui cara penjualan pada umumnya dan melalui lelang tetap tidak menyurutkan niat penangkapan paus. Peneliti berpendapat bahwa budaya konsumsi paus dapat menghilang. Menurunnya tingkat konsumsi dan rendahnya penjualan di pasar membuat pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melestarikan budaya mengkonsumsi paus.

Kebijakan Pemerintah Jepang dalam Penangkapan Paus

Dalam disertasi yang berjudul *Japan and the IWC: Investigating Japan's Whaling Policy Objectives* yang ditulis oleh Judith Woters, ada 6 alasan yang dimiliki oleh badan yang berwenang seperti *Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries* (MAFF) atau Kementerian Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, *Ministry of Foreign Affairs* (MOFA) atau Kementerian Luar Negeri, serta *Fisheries Agency* yang berada di bawah MAFF untuk melakukan penangkapan paus yaitu 1) pihak yang berwenang percaya bahwa Jepang harus melakukan penangkapan paus dibawah program penelitian ilmiah untuk membuktikan bahwa ada beberapa spesies yang dapat ditangkap tanpa membahayakan populasinya, 2) Jepang memiliki dasar legalitas yang tertuang dalam artikel 5 ICRW, 3) jika penangkapan paus tidak dapat dilakukan, maka hal ini berarti adanya kemungkinan penurunan budget dan kekuatan politik MAFF dan FA, 4) menangkap paus dapat menghidupkan industri dan diharapkan berdampak pada dicabutnya moratorium dan meemperkuat posisi MAFF dan FA, 5) pihak yang berwenang khawatir bahwa pelarangan penangkapan paus akan berdampak pada sektor lain yang berada di bawah kewenangan mereka, dan yang terakhir tekanan dari pihak barat atas kebiasaan Jepang memakan daging paus tidak ada bedanya dengan kebiasaan negara lain memakan daging sapi maupun babi.

Alasan di atas membuktikan bahwa pemerintah Jepang memiliki komitmen untuk mendukung penangkapan paus. Alasan tersebut didukung oleh pernyataan H.E Ryo Nakamura mengenai posisi Pemerintah dalam penangkapan paus. dalam wawancara yang dilakukan beliau menjelaskan: "*Government of Japan are supporting scientific whaling. It's also because whaling is our culture*". Pemerintah Jepang juga melakukan subsidi terhadap program penelitian ilmiah yang mereka lakukan. Pada sub-bab berikutnya akan dijelaskan bahwa Pemerintah melakukan subsidi pada program penelitian ilmiah ini. Alasan mengapa subsidi dilakukan adalah karena penelitian ilmiah yang dilakukan membutuhkan biaya yang besar, namun keuntungan yang didapatkan dari penjualan byproduct tidak mampu menutupi keperluan yang dibutuhkan. Menurut International Fund for Animal Welfare, diperkirakan selama 25 tahun Pemerintah Jepang mengeluarkan dana sebesar 30 miliar yen atau sekitar 400 juta dollar Amerika (Mulvaney, 2012:10). Pemerintah Jepang melakukan subsidi karena mereka percaya bahwa industri paus akan menguntungkan di masa depan ketika populasi paus kembali pulih dan dapat dieksploitasi kembali (Woters, 2009:103).

Pemerintah Jepang melakukan berbagai macam kampanye dalam negeri untuk meningkatkan kembali konsumsi paus. Angka konsumsi paus tertinggi di Jepang adalah pada saat perang dunia ke-2 selesai, dimana masyarakat sangat membutuhkan sumber protein alternatif. Namun sejak saat itu, angka konsumsi mengalami penurunan. Dewasa ini, tidak banyak masyarakat Jepang yang mengkonsumsi paus. Meskipun demikian, daging paus dijual dan dikonsumsi oleh sebagian kecil masyarakat. Dewasa ini konsumsi daging paus dapat dikatakan rendah. Melalui kegiatan kampanye, Pemerintah memiliki tujuan untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali budaya mengkonsumsi daging paus.

Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini adalah Jepang masih melakukan penangkapan paus adalah karena adanya dorongan untuk melestarikan budaya. Jepang melakukan kegiatan penangkapan paus dengan tujuan untuk penelitian. Namun berdasarkan analisis sebelumnya, peneliti mengambil kesimpulan bahwa budaya menjadi salah satu faktor dilakukannya kegiatan penangkapan. Hal ini diperkuat dengan bukti Jepang memiliki kebudayaan menangkap dan mengkonsumsi paus. Selain itu terdapat data yang menyatakan bahwa terdapat daging paus dalam jumlah besar beredar di pasar. Kampanye yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menghidupkan kembali kebudayaan mengkonsumsi paus menjadi bukti bahwa budaya menjadi faktor pendorong Jepang melakukan penangkapan paus.

Pemerintah Jepang memiliki kebijakan untuk mendukung Institute of Cetacean Research melakukan penelitian ilmiah terhadap paus. Institute of Cetacean Research juga melakukan penjualan daging paus kepada masyarakat dengan cara lelang. Diperbolehkannya dilakukan penjualan daging paus tidak terlepas dari peraturan yang terdapat di dalam ICRW dimana hasil specimen yang telah digunakan harus digunakan sebaik-baiknya menurut pihak yang memiliki wewenang untuk memberikan izin penelitian.

Pemerintah Jepang melakukan berbagai macam kampanye dalam negeri untuk meningkatkan kembali konsumsi paus. Angka konsumsi paus tertinggi di Jepang adalah pada saat perang dunia ke-2 selesai, dimana masyarakat sangat membutuhkan sumber protein alternatif. Namun sejak saat itu, angka konsumsi mengalami penurunan. Dewasa ini, tidak banyak masyarakat Jepang yang mengkonsumsi paus. Meskipun demikian, daging paus dijual dan dikonsumsi oleh sebagian kecil masyarakat. Dewasa ini konsumsi daging paus dapat dikatakan rendah. Melalui kegiatan kampanye, Pemerintah memiliki tujuan untuk memperkenalkan dan menghidupkan kembali budaya mengkonsumsi daging paus.

Referensi

- Animal Planet. "Whale Wars Is whale meat popular in Japan?" diakses dari <http://www.animalplanet.com> pada tanggal 8 Oktober 2016
- Animal Welfare Institute. "Commercial Whaling" diakses dari <http://awionline.org> pada tanggal 7 April 2016
- Bale, Rachel. "Japan Kills 200 Pregnant Minke Whales" diakses dari <http://news.nationalgeographic.com> pada tanggal 8 Oktober 2016
- Barnett, John. *The Meaning of Environmental Security: Ecological Politics and Policy in the New Security Era* (London: Zedbooks Ltd, 2001)
- Cresswell, John W. "Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed" California: Sage publications 2009
- Encyclopedia Britannica. "Jomon Culture" <https://www.britannica.com> diakses pada tanggal 7 Oktober 2016

- Habu, Junko. "Ancient jomon of Japan". Cambridge University Press, Cambridge. 2004
- Hirata, Keiko. "Why Japan Supports Whaling". Journal of International wildlife and Policy. (2005).
- Hrafn Ólafsson, Guðlaugur. "Whaling and International Law". B.A Thesis in law at the Faculty of Law and Social Science University of Akureyri. (2012)
- International Fund for Animal Welfare. "The truth about 'Scientific' whaling" diakses dari <http://www.ifaw.org/> pada tanggal 28 maret 2015
- International Whaling Commission. "Commercial Whaling" diakses dari <https://iwc.int/commercial> pada tanggal 25 maret 2015
- International Whaling Commission. "whaling" diakses dari <http://iwc.int> pada tanggal 8 Februari 2016
- Jerican. "Did You Know? Crude Oil saved The Whales" diakses dari www.oil-.net pada tanggal 21 Desember 2015
- Kalland Arne, Brian Moeran. "Japanese Whaling: The End of an Era?" The Journal of Japanese Studies Vol. 20, No. 1 (Winter, 1994)
- Kobayashi, Lisa. "Lifting The International Whaling Commission's Moratorium On Commercial Whaling as The Most Effective Global Regulation of Whaling". Diakses dari <https://environs.law.ucdavis.edu/volumes/29/2/kobayashi.pdf>
- McCurry, Justin. "Japan's appetite for whale meat wanes". Diakses dari <https://www.theguardian.com> pada tanggal 7 Oktober 2016
- Oberthür, Sebastian. "The International Convention for the Regulation of Whaling: From Over-Exploitation to Total Prohibition". Yearbook of International Co-Operation On Environment and Development 1998/99.
- Philips, Sara. "Japan whaling: Renewed program slammed by International Whaling Commission scientists" diakses dari <http://www.abc.net.au/news/> pada tanggal 8 Oktober 2016
- Rajca, Jennifer. "Australia wins whaling case against Japan in The Hague". Diakses dari <http://www.news.com.au/> pada tanggal 2 April 2015
- Sakuma, Junko. "Whale Meat Doesn't Sell: The ICR Reports Miserable Result of Auction" diakses dari <http://ika-net.jp/en/> pada tanggal 8 Oktober 2016
- Fishery: A Case Study Of Baird's." Adaptive Marine Resource Management Systems in the Pacific 8.3-4 (1991)
- Takashi, Junichi, Ame Kalland, Brian Moeran, and Theodore C, Bestor. 1989. "Japanese Whaling Culture Continuities and Diversities" Maritime Anthropological Studies (MAST):2 (2): 106
- Tangley, L. "IWC Sets Commercial Whaling Moratorium". Society for Science & Public. (1982)
- The Guardian. "Whale meat on the menu at Japanese food festival" diakses dari <http://www.theguardian.com/> pada tanggal 4 Januari 2016
- The Guardian. "Whale meat on the menu at Japanese food festival" diakses dari <http://www.theguardian.com/> pada tanggal 4 Januari 2016
- The Institute of Cetacean Research. "Japan's research whaling in the Antarctic" diakses dari <http://www.icrwhale.org/> pada tanggal 28 maret 2015
- Wakayama Prefecture. "Wakayama Prefecture Official' View on Dolphin Fishery at Taiji." Diakses dari <http://www.pref.wakayama.lg.jp> pada tanggal 7 Oktober 2016
- Walsh, John. "Research Whaling on Table". American Association for the Advancement of Science. (1987)
- Walsh, John. "Research Whaling on Table". American Association for the Advancement of Science. (1987)

Whale and Dolphin Conservation. "WHALING IN JAPAN" diakses dari
<http://us.whales.org/> pada tanggal 9 September 2016
Whaling in the Antarctic (Australia v. Japan: New Zealand intervening) International
Court of Justice unofficial press release Maret 2014
World Wildlife Fund for Nature. "Whales killed by whaling since moratorium" diakses
dari <http://wwf.panda.org/> pada tanggal 25 maret 2015